

Turunkan Stunting Pemprov Berikan 1200 Paket Bantuan



Sumber: www.cenderawasihpos.jawapos.com

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Papua total sudah menyalurkan 1.200 paket bantuan penurunan stunting. Bantuan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) itu disalurkan ke Posyandu di empat kabupaten di Papua.

Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Papua, Linda Onibala menyerahkan bantuan paket PHBS untuk Posyandu dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Waropen. Penyerahan ribuan paket PHBS berikut timbangan bayi tersebut dilakukan pasca dirinya baru 17 hari dilantik.

“Kami ingin fokus mempercepat penurunan angka stunting, guna menyokong program strategis nasional. Tidak seberapa bantuan yang kami serahkan, namun kami harapkan bisa bermanfaat bagi posyandu di Waropen,” beber Linda saat kunjungan di Posyandu Mekar Jaya, Kampung Usaiwa, Distrik Hureyfaisey, Botawa, Waropen.

Pihaknya juga berharap TP PKK Waropen bisa lebih bersemangat, serta fokus menangani stunting. Sementara dari paket bantuan 1.200 PHBS tersebut, masing-masing sebanyak 300 paket diserahkan kepada Posyandu di Kabupaten Sarmi, Supiori, Yapen dan Waropen.

Penyerahan bantuan paket PHBS untuk mempercepat penurunan stunting tersebut masih akan berlanjut. Sebab, Pj Ketua PKK Papua ingin melakukan kunjungan kerja ke seluruh kabupaten dan kota di Papua.

“Ini kabupaten ketiga yang kami kunjungi setelah dilantik awal Oktober lalu, kami mengharapakan kerja sama serta sinergitas program PKK antara provinsi dan kabupaten/kota. Supaya bisa sama-sama jalankan 10 program PKK, termasuk penurunan *stunting*,” ajaknya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Waropen Grace Bisay mengapresiasi kunjungan kerja PKK Papua. “Perhatian dan kepedulian terhadap Posyandu di Waropen, akan dijadikan sebagai motivasi untuk memaksimalkan upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga serta mempercepat penurunan stunting diwilayahnya,” pungkasnya.

Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun meminta Pemda Supiori meningkatkan peran Posyandu, agar dapat mengambil bagian dan berperan penting menekan angka stunting di wilayah tersebut. Penegasan itu disampaikan Gubernur Ridwan, dalam kunjungan kerjanya di Sorindeweri, Kabupaten Supiori, Rabu (4/10/2023).

Gubernur menyoroti masalah stunting di Supiori lewat data prevelensi yang mencapai 40,2 persen, atau tertinggi di Papua. Meski demikian, Ridwan mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil Pemerintah Kabupaten Supiori, serta semua pihak yang terlibat dalam upaya penurunan stunting, antara lain, program-program pemberian gizi, penyuluhan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat yang merupakan bagian integral dari solusi untuk mengatasi masalah stunting.

“Kita telah melihat beberapa kemajuan yang cukup signifikan dalam upaya penurunan stunting di Supiori. Namun, perjalanan ini masih panjang dan perlu ada komitmen bersama dari semua pihak termasuk TP-PKK setempat,” harapnya.

Diketahui, angka tertinggi Stunting di Supiori terdapat di Distrik Supiori Utara sebesar 37.4 persen. Sedangkan terendah di Distrik Supiori Barat sebesar 11 persen. Data analisis situasi juga menunjukkan bahwa prevelensi tertinggi terdapat di Kampung Aruri sebesar 53,57 persen dan terendah di Kampung Masyai sebesar 11 persen. Sementara anak stunting tertinggi terdapat di Kampung Wongkei sebesar 30 persen dan terendah di Kampung Insumbrei sebesar 7 persen.

Ridwan menambahkan akan terus berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten, lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat setempat untuk memastikan program penanganan *stunting* berjalan maksimal.

“Karena itu, dalam kunjungan kerja ini kita akan melihat secara langsung implementasi program penurunan *stunting* yang telah dijalankan. Kami akan mendengarkan pengalaman, tantangan, dan solusi yang telah ditemukan oleh para pemangku kepentingan di lapangan. Kami juga akan berbicara langsung dengan masyarakat setempat untuk memahami perspektif mereka,” ujar Ridwan.

Sementara itu, dalam kunjungan kerjanya Gubernur Rumasukun dan jajaran menyerahkan paket bantuan penanganan *stunting* kepada Pemda setempat, antara lain, kelambu 7.300 pcs, obat cacing *Albendazole* 128.000 tablet dan *pirantel pamoat* 4.000 tablet. Kemudian obat tambah darah 818.000 tablet, vitamin A 13.350 tablet, obat malaria DHP 5.616 Buah dan RDT 7925 buah serta mineral mix 160 buah dari Dinas Kesehatan Papua. Selain itu terdapat bantuan beras 2650 kg dan pekerjaan bangunan pengolahan sagu satu unit serta makanan olahan ikan untuk penanganan *stunting* dari Dinas Pertanian maupun Dinas Perikanan Papua. Bibit tanaman produktif di Kampung Yan Doker dan *Speedboat* satu unit untuk perlindungan Mangrove di Kampung Soweck dari Dinas Kehutanan Papua, serta 200 judul buku sebanyak 274 eksemplar dari Dinas Pendidikan Papua.

Sementara Bulog Papua memberikan bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 10 kg dengan Target 2.207 KPM serta bantuan paket pangan dengan target 100 orang. Disamping pemberian bantuan untuk penanganan *stunting*, turut dicanangkan Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Supiori, guna menjaga pasokan dan pengendalian Inflasi serta penanam bibit pohon di Halaman Kantor Bupati Supiori.

Sumber berita:

1. www.cenderawasihpos.jawapos.com, Turunkan *Stunting* Pemprov Berikan 1200 Paket Bantuan, 24 Oktober 2023; dan
2. www.teraspapua.com, Peran Posyandu Sangat Penting Untuk Menekan *Stunting* Di Supiori, 4 Oktober 2023.

Catatan berita:

Prevalensi *stunting* di Indonesia pada tahun 2022 masih berada pada angka 21,6%, angka tersebut masih berada di atas standar prevalensi *stunting* oleh WHO, yaitu kurang dari 20%. Pemerintah Indonesia juga mempunyai target untuk mengentaskan *stunting* hingga angka 14% pada tahun 2024. Provinsi dengan prevalensi *stunting* tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (35,3%), Sulawesi Barat (35%), Papua (34,6%), Nusa Tenggara Barat (32,7%), dan Aceh (31,2%). Pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Perpres 72/2021) menimbang bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan serta ketentuan terdahulu, yaitu Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi belum dapat

mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif sehingga perlu diganti. *Stunting* sendiri merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan¹.

Untuk melaksanakan percepatan penurunan *stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang bertujuan untuk²:

- a. menurunkan prevalensi *stunting*;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*³. Untuk tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim percepatan penurunan *stunting* tingkat provinsi⁴, yang terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)⁵.

Adapun target pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* sampai tahun 2024 adalah⁶:

- a. Tersedianya layanan intervensi spesifik, dengan indikator sasaran:
 - i. ibu hamil Kurang Energi Kronik (KKE) yang mendapatkan tambahan asupan gizi mencapai 90%;
 - ii. ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan mencapai 90%;
 - iii. remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah daerah mencapai 58%;
 - iv. bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif mencapai 80%;
 - v. anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) sebanyak 80%;
 - vi. anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk sebanyak 90%;

¹ Pasal 1 angka 1 Perpres 72/2021

² Pasal 2 Perpres 72/2021

³ Pasal 10 ayat (1) Perpres 72/2021

⁴ Pasal 20 ayat (1) Perpres 72/2021

⁵ Pasal 20 ayat (3) Perpres 72/2021

⁶ Lampiran Perpres 72/2021

- vii. anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya sebanyak 90%;
- viii. anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi sebanyak 90%;
- ix. anak berusia di bawah lima tahun yang memperoleh imunisasi dasar lengkap mencapai 90%;
- b. Tersedianya layanan intervensi sensitif, dengan indikator sasaran:
 - i. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan mencapai 70%;
 - ii. Kehamilan yang tidak diinginkan 15,5%;
 - iii. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah sebanyak 90%;
 - iv. Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas sebanyak 100%;
 - v. Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas sebanyak 90%;
 - vi. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 112,9juta penduduk;
 - vii. Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan sebanyak 90%;
 - viii. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat sebanyak 10juta;
 - ix. Cakupan target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *stunting* di lokasi prioritas sebanyak 70%;
 - x. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan sebanyak 15,6juta;
 - xi. Desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free* sebanyak 90%

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 – 2023, visi pembangunan Provinsi Papua adalah “Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan”. Visi ini dijabarkan menjadi lima misi, yaitu:

- a. memantapkan kualitas dan daya saing SDM;
- b. memantapkan rasa aman, tentram dan damai;
- c. penguatan tata kelola pemerintahan;
- d. penguatan dan percepatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan; dan
- e. percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan tertentu.

Misi ini kemudian dijabarkan ke dalam program-program pada setiap urusan pemerintahan. Terkait dengan penanganan stunting dijabarkan pada urusan wajib pelayanan dasar kesehatan dimana terdapat program:

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Capaian Kinerja	
		Awal (2018)	Akhir (2023)
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rata-rata konsumsi kalori per hari	2.144,84 kkal	2.300 kkal
	Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi	23,3%	50%
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	48,44%	70%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan kelurahan/kampung <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	62,15%	65%
	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	10,02%	5,5%
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita	31,35%	25%
	Prevalensi malnutrisi (<i>wasting/obesitas</i>) pada anak balita	1,38%	0,65%
	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	-	40%
	Angka kematian balita (AKBa)	7,13 per 1.000 klh	4 per 1.000 klh
	Rasio Posyandu yang aktif	64,6%	70%
	Cakupan kunjungan bayi (KN1)	49,4%	52%
	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	46,95%	52%
	Cakupan balita OAP yang bergizi baik	-	70%

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 (Pergub 51/2022), pada Lampiran Pergub 51/2022 yaitu Tabel 4.10, diketahui bahwa salah satu prioritas pembangunan daerah adalah

peningkatan kualitas dan pemerataan SDM. Sasaran prioritas ini antara lain meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator:

Indikator Sasaran	2021	Target 2023
Angka Harapan Hidup	65,93 tahun	69,59 tahun
Angka Kematian Bayi		4 per 1000 penduduk
Angka Kematian Ibu		183,3 per 1000 kelahiran hidup
Prevalensi Stunting	29,5% – 26,2%	25%
Angka Kesakitan		3%

Atas prioritas pembangunan daerah ini dijabarkan pada fokus pembangunan antara lain **penanganan stunting**, pengembangan rumah sakit rujukan pada setiap wilayah adat, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan (primer dan rujukan), dan pemerataan tenaga kesehatan dan insentif. Dinas Kesehatan sebagai SKPD yang diberikan wewenang untuk pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar kesehatan merealisasikan fokus pembangunan tersebut pada tiga program prioritas, yaitu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Disclaimer:

Seluruh informasi hukum yang tersedia dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat instansi.